

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan reformasi yang ada di Indonesia memiliki perspektif baru mengenai kewenangan pengelolaan keuangan publik, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Penyusunan laporan keuangan, baik pada pemerintah pusat dan daerah memiliki proses dan peraturan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dalam penyusunan sebuah laporan keuangan, pemerintah daerah memiliki sistem penyusunan keuangan yang mana berbeda-beda untuk setiap daerah.

Otoritas lokal bertanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana yang telah diterima. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari beberapa komponen penting, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Setiap komponen laporan keuangan ini mencerminkan posisi keuangan pemerintah daerah dan kinerja keuangannya.

Dalam pengelolaan sebuah keuangan daerah harus dilakukan dengan cara terbuka dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat, serta

terlaksananya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan asas otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah gagasan operasional pemerintah daerah. Diwujudkan dalam suatu penerimaan, belanja, dan pembiayaan kebutuhan daerah yang dilaksanakan dalam sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup dari banyak tata cara yang disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau bisa disingkat dengan PPKD.

Keuangan daerah menempati tempat yang sangat krusial dalam pelaksanaan suatu pemerintahan daerah, karena pemerintahan daerah tidak akan berfungsi secara baik tanpa adanya sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan yang efektif menjadi salah satu syarat untuk mengetahui kemampuan nyata suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Sebuah proses akhir dari pengelolaan keuangan daerah adalah menyusun laporan keuangan yang relevan.

Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan suatu aspek penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang baik memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pihak yang berkepentingan seperti warga negara, investor, dan lembaga keuangan. Sehingga perlu diperhatikan penting untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat serta transparan.

Meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas telah menyebabkan peningkatan peran akuntan pemerintah di sektor publik. Dalam

hal ini, peran akuntansi sangat menentukan, terutama dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara akurat. Tentunya laporan keuangan yang akurat perlu dalam prosedur penyusunannya, disusun menurut prosedur tertentu, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang berlaku.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan wilayahnya. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, perlu pelaksanaan penyusunan laporan keuangan secara lengkap seperti dengan peraturan standar akuntansi pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Laporan keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dibuat dengan tujuan memberikan penjelasan yang jelas tentang posisi keuangan serta semua transaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode akuntansi. Laporan keuangan dimanfaatkan guna memahami nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan. Dari posisi keuangan, efektivitas keuangan dan efisiensi unit pelaporan, dan membantu menilai kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang ada di daerah.

Penyusunan dari Laporan Keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan didasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Sebuah laporan keuangan yang dibuat serta digambarkan dengan basis akrual akan memuat laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Isi dari laporan keuangan milik pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang dilakukan setelah mengumpulkan Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dikirimkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya selisih nominal. Pada Bidang Akuntansi dan Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan saat ini sudah memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi Sistem Keuangan Daerah atau sering disebut dengan SIMKEUDA. Aplikasi ini digunakan sebagai alat pencatatan transaksi oleh tiap OPD. Dengan adanya aplikasi SIMKEUDA meminimalisir adanya selisih nominal karena aplikasi ini bisa diakses oleh semua pihak terkait dengan akun tiap OPD.

Memenuhi ketepatan waktu (*timeliness*) dalam pelaporan keuangan merupakan faktor penting dalam penyajian informasi yang relevan. Sebuah laporan keuangan memiliki informasi berguna saat informasi yang terkandung di dalamnya tepat dan relevan. Kewajiban akan ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan sudah jelas telah tertuang dalam kerangka dasar pelaporan, ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus diperhatikan.

Pada fakta yang terjadi di lapangan pengumpulan LK dan CALK tiap OPD disusun dan disampaikan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan selesai disusun dan diperiksa dalam tahapnya. Hal ini dikarenakan karena hambatan-hambatan yang menjadi halangan dari penyusunan LK dan CALK tiap OPD. Hambatan-hambatan penyusunan LK dan CALK setiap OPD seringkali menjadi alasan OPD terlambat mengirimkan LK dan CALK.

Laporan keuangan harus berisi data yang tepat dan relevan. Faktanya masih banyak OPD yang mengirimkan LK dan CALK yang masih tidak sesuai dengan peraturan penulisan akuntansi yang berlaku di BPKD Kabupaten Pekalongan. LK dan CALK yang terdapat kesalahan akan dikoreksi dengan tujuan agar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dan relevan dengan peraturan yang ada. Laporan yang memiliki koreksi kesalahan penulisan akan dikembalikan ke tiap OPD. Pengembalian laporan ini dengan tujuan pembetulan kembali laporan yang terdapat kesalahan. Tidak jarang juga OPD yang melakukan revisi penulisan sampai dengan dua kali revisi. Hal ini dikarenakan penyusunan laporan yang dilakukan tidak dilakukan dengan teliti.

Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada tiap OPD. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia ini

mengakibatkan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan mengalami keterlambatan untuk diselesaikan. Permasalahan selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang minim, seperti komputer yang terbatas dan jaringan yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan laporan yang dibuat cenderung tidak maksimal. Disamping itu, masalah sumber daya manusia menjadi dominan yang perlu dibenahi, mengingat pentingnya sebuah laporan keuangan bagi pemerintahan daerah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang penulis buat, dengan ini penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Keterlambatan Pengiriman Laporan Keuangan (LK) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan.**”

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi dari pengiriman Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan?
2. Hambatan apa saja yang menyebabkan terlambatnya pengiriman Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) oleh

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan?

3. Apakah keterlambatan pengiriman Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ini berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan?
4. Bagaimana prosedur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan?
5. Bagaimana strategi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi tiap OPD yang mengalami kesulitan dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sehingga mengalami keterlambatan pengiriman?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Selanjutnya tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi dari pengiriman Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengiriman Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui mengenai dampak dari keterlambatan pengiriman Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ini berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi tiap OPD yang mengalami kesulitan dalam penyusunan LK dan CaLK sehingga mengalami keterlambatan pengiriman.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Tugas akhir ini agar dapat memberikan gambaran umum mengenai Pengaruh Keterlambatan LK dan CALK OPD terhadap Penyusunan LKPD Kabupaten Pekalongan.

2. Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan akuntansi, terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan.
3. Diharapkan dengan adanya tugas akhir ini dapat menambah wawasan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan di BPKD Kabupaten Pekalongan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara ilmu yang didapat di perkuliahan dengan ilmu yang didapatkan selama melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai pengumpulan LK dan CALK OPD di Kabupaten Pekalongan.

3. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan universitas bisa berhubungan baik dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

4. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan, sehingga masyarakat mengerti untuk apa saja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pekalongan direalisasikan.

1.5 Metode Tugas Akhir

1.5.1 Lokasi Tugas Akhir

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan pada Bagian Akuntansi dan Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

1.5.2 Jenis Tugas Akhir

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktik dan teori yang telah diajarkan. Kemudian diambil kesimpulan dari perbandingan tersebut.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Penulis mengamati langsung Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) melakukan konsultasi mengenai laporan keuangan dan saat pembahasan mengenai revisian LK dan CALK yang mereka susun. Pengamatan lainnya yaitu saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan, serta pengamatan hambatan yang menyebabkan OPD mengalami keterlambatan pengumpulan LK dan CALK.

2. Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan mengenai penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, serta pengaruh dari keterlambatan pengumpulan LK dan CALK OPD terhadap penyusunan LKPD Kabupaten Pekalongan.

3. Document (Dokumen)

Dengan metode dokumen ini penulis mempelajari baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021, dan buku-buku yang berhubungan dengan Akuntansi Pemerintah.

1.5.4 Sumber Data

Dalam mendapatkan data, penulis memiliki jenis dan sumber data yang digunakan dalam uraian sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan melalui wawancara kemudian diolah dan disusun kembali oleh penulis, mengenai hambatan-hambatan pengiriman LK dan CALK OPD dan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam bentuk jadi seperti sejarah singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan, struktur organisasi, dan LKPD Kabupaten Pekalongan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir disusun dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang Masalah
1.2	Perumusan Masalah
1.3	Tujuan Tugas Akhir
1.4	Kegunaan Tugas Akhir
1.4.1	Manfaat Praktik
1.4.2	Manfaat Praktis

1.5 Metode Tugas Akhir

1.5.1 Lokasi Tugas Akhir

1.5.2 Jenis Tugas Akhir

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1.5.4 Sumber Data

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

2.1.1 Pengertian Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan

2.1.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Menghasilkan Laporan Keuangan

2.2 Akuntansi Pemerintahan

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.3 Laporan Keuangan Pemerintahan

2.3.1 Peran Laporan Keuangan

2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

2.3.3 Pengguna dan Kebutuhan Informasi

2.3.4 Jenis Laporan Keuangan Pemerintahan

2.3.5 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

3.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

3.2 Filosofi

3.3 Struktur Organisasi

3.4 Aktivitas Perusahaan

BAB IV Hasil dan Pembahasan

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran